

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN
35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2007-2010**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SUWANTI
NIM. C2B008096

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Suwanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008096

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR
PERTANIAN 35 KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007-2010**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc., Ph.D

Semarang, 28 Juni 2013

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc., Ph.D)

NIP. 19581121984031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Suwanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008096
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR
PERTANIAN 35 KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007-2010**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Juli 2013

Tim Peguji:

1. Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc., Ph.D. ()
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc. ()
3. Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, MSi. ()

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., MCom., Ph.D., Akt.)

NIP 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Suwanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2010 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

(Suwanti)
NIM: C2B008096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al baqarah:286)

Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita kerjakan tetapi selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya

"if There is will, There is A way"

"Man jadda wajada"

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak, Mamak, Adik tercinta

Atas Doa dan kasih Sayangnya

ABSTRACT

The agricultural sector is the dominant sector in Central Java, but the lack of government's role in the sector. This study aimed to analyze the effect of government spending and other factors that may affect the agricultural sector GDP.

This study uses secondary data analysis tools to approach the data panel Fixed Effect Model (FEM) or the Least Square Dummy Variable (LSDV) model, which consists of the data during the period 2007-2010 times series and cross section data 35 regency / cities in Central Java.

Results of this study indicate that the agricultural sector of government spending positive and significant effect on the agricultural sector PDRB, labor and a significant positive effect on the agricultural sector PDRB. Direction of positive regression coefficient indicates that government spending, labor may lead to an increase in agricultural PDRB.

Keywords: Government Spending, Employment, PDRB Agricultural Sector, Central Java.

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah, tetapi masih kurangnya peran pemerintah dalam sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan faktor lain yang dapat mempengaruhi PDRB sektor pertanian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) model, yang terdiri dari data *times series* selama periode 2007-2010 dan data *cross section* 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Arah koefisien regresi positif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, meningkat dapat menyebabkan peningkatan PDRB sektor pertanian.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja, Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2010”, sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lepas dari dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D selaku Pembantu Dekan III sekaligus sebagai dosen pembimbing terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan dan petunjuk dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
4. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku Dosen Wali atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua, Bapak dan Mamak terimakasih banyak atas doa, curahan kasih sayang, motivasi dan kesabarannya yang telah diberikan.
7. Adik ku tersayang, Nurul Arafah, terimakasih udah menjadi Adik sekaligus sahabat. Ayo semangat sekolahnya, semoga bisa menjadi lebih baik dari kakak.
8. Keluarga Om Yus Sudarso, S.Sos., M.Si dan Bulik Mur Yani trimakasih atas nasehat, saran, masukan dan perhatiannya.
9. Sahabat tersayang dari seperantauan, Lia Afiani dan Ria Marginingsih, terimakasih telah menjadi teman, sahabat dan kakak, selalu jaga kekompakan semoga persahabatan kita sampai akhir hayat.
10. Ibu-Ibu PKK Isty, Hera, Haniz, Ochie, teman yang ada diwaktu suka dan duka. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan IESP 2008 Reguler II : Adelino, Andika, Berlian, Iqbal, firza, Gerhad, Ketut, Isty, Leo, Haniz, Muzi, Andi, Hera, Tito, Ochie, Rekha, Ryan, Philip, Yanuar, teman belajar, teman main, teman berbagi, terimakasih atas kebersamannya.
12. Keluarga Kost Umbul Puteri 17, Nia, Fani, Ayu, Ike, Iin, Dina, Syaukati, Juwita, Dani, Dian Hayu, Intan, Arintia, Estu, Bara, Arinda, Kholis, Tutik dan Mayang, terimakasih banyak kalian udah menjadi adik, teman dan sahabat dan selalu membuat betah hidup bersama kalian.

13. Teman-teman KKN Tim II Desa duren Kecamatan Sumowono, Febri, Mirza, Ivan, Andri, David, Medi dan Sesar terimakasih atas motivasinya, kenangan manis dan pengalaman hidup bersama kalian tidak akan terlupakan.
14. Teman-teman STEKOM Semarang Ary, Didik, Erfan, Mus, Majid, Sella, Ifah, Mita, Frida, Faqih, Tini, Ryan, Bayu, terimakasih atas kebersamannya.
15. Kepada pihak-pihak yang terkait yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 28 Juni 2013

Penulis

Suwanti

NIM.C2B008096

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.2.1 Teori Adam Smith	17
2.1.2.2 Teori Harrod-Domar	20
2.1.2.3 Teori Schumpeter	22
2.1.2.4 Teori Neo-Klasik	23
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto	24
2.1.4 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian	31

	2.1.5	Pengeluaran Pemerintah	33
	2.1.6	Teori Pengeluaran Pemerintah	34
		2.1.6.1 Kebijakan Fiskal	34
		2.1.6.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro	37
		2.1.6.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro	38
	2.1.7	Hubungan Variabel	41
	2.2	Penelitian Terdahulu	45
	2.3	Kerangka Pemikiran	52
	2.4	Hipotesis	52
BAB III		METODOLOGI PENELITIAN	53
	3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53
		3.1.1 Variabel Penelitian	53
		3.1.2 Definisi Operasional	53
	3.2	Jenis dan Sumber Data	54
	3.3	Metode Pengumpulan Data	56
	3.4	Metode Analisis	56
		3.4.1 Spesifikasi Model	57
		3.4.2 Pengujian Model	59
	3.5	Uji Asumsi Klasik	60
		3.5.1 Deteksi Heterokedastisitas	60
		3.5.2 Deteksi Autokorelasi	61
		3.5.3 Deteksi Multikolinearitas	62
		3.5.4 Deteksi Normalitas	62
	3.6	Pengujian Statistik	63
		3.6.1 Koefisien Determinasi	63
		3.6.2 Uji Signifikasi Uji F	64
		3.6.3 Uji Signifikasi Uji t	65
BAB IV		HASIL DAN PEMBAHASAN	66
	4.1	Keadaan Wilayah	66
		4.1.1 Letak Geografis dan Pemerintahan	66

4.1.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	68
4.1.3	Perkembangan Pertumbuhan Sektor Pertanian	70
4.2	Analisis Data	72
4.2.1	Pengujian Model	73
4.3	Uji Asumsi Klasik	74
4.3.1	Deteksi Multikolinearitas	75
4.3.2	Deteksi Heteroskedastisitas	76
4.3.3	Deteksi Autokorelasi	77
4.4	Hasil Regresi	78
4.4.1	Estimasi FEM	78
4.5	Hasil Uji Statistik	78
4.5.1	Koefisien Determinan.....	78
4.5.2	Uji F-stat	80
4.4.3	Uji Parsial (t-Stat)	80
4.6	Interpretasi Hasil	83
4.6.1	Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap PDRB	83
4.6.2	Pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian	83
BAB V	PENUTUP	84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Keterbatasan	85
5.3	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tengah Tahun 2007-2010 3
Tabel 1.2	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 5
Tabel 1.3	Realisasi pengeluaran pemerintah Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah 8
Tabel 4.1	Hasil Analisis Data 73
Tabel 4.2	Hasil <i>Auxiliary Regression</i> Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian terhadap PDRB sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 75
Tabel 4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 76
Tabel 4.4	Breuch Godfrey Serial Correlation LM Test 77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Pertumbuhan PDRB berdasarkan Sektoral di Jawa Tengah 6
Gambar 1.2	Realisasi Pengeluaran pemerintah Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun 2007-2010 7
Gambar 2.1	Pertumbuhan Pengeluaran pemerintah Menurut Wagner 39
Gambar 2.2	Kurva Perkembangan pengeluaran Pemerintah 40
Gambar 4.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 69
Gambar 4.2	laju Pertumbuhan Sektor pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam rangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi menurut Todaro (2003), pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1993) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah

proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana prasarana produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggara pemerintah daerah sebagai sub sistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing propinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah harus mampu menghadapi tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang di indikasikan dengan meningkatnya PDRB, serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola

kekayaan daerah yang memiliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan daerah tersebut.

Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut dalam kondisi stabil, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa maupun Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2007-2010.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2007-2010 (dalam persen)

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi				Rata-rata
		2007	2008	2009	2010	
1	DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,5	6,01
2	Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,2	5,68
3	Banten	6,04	5,77	4,71	6,08	5,62
4	Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,48	5,45
5	DI Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,88	4,65
6	Jawa Timur	6,11	5,94	5,01	6,68	5,90
	Indonesia	6,35	6,01	4,63	6,2	5,75

Sumber: BPS, Statistik Indonesia berbagai tahun

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir tumbuh 5,45% per tahun. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tampak stabil dari tahun ke tahun namun apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa masih tergolong rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga lebih lambat dari pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi DKI Jakarta masih menempati

posisinya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (5,90%), Provinsi Jawa Barat (5,68%), Provinsi Banten (5,62%), Provinsi Jawa Tengah (5,45%), Provinsi DIY (4,65%).

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan. Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi Negara berkembang. Sektor ini menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industri memberikan kontribusi terhadap PDRB, sumber devisa, serta mendorong Bergeraknya sektor-sektor riil lainnya. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Terlihat dari tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian. Berikut data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut provinsi di pulau Jawa.

Tabel 1.2
Tingkat Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Menurut Provinsi di Pulau Jawa

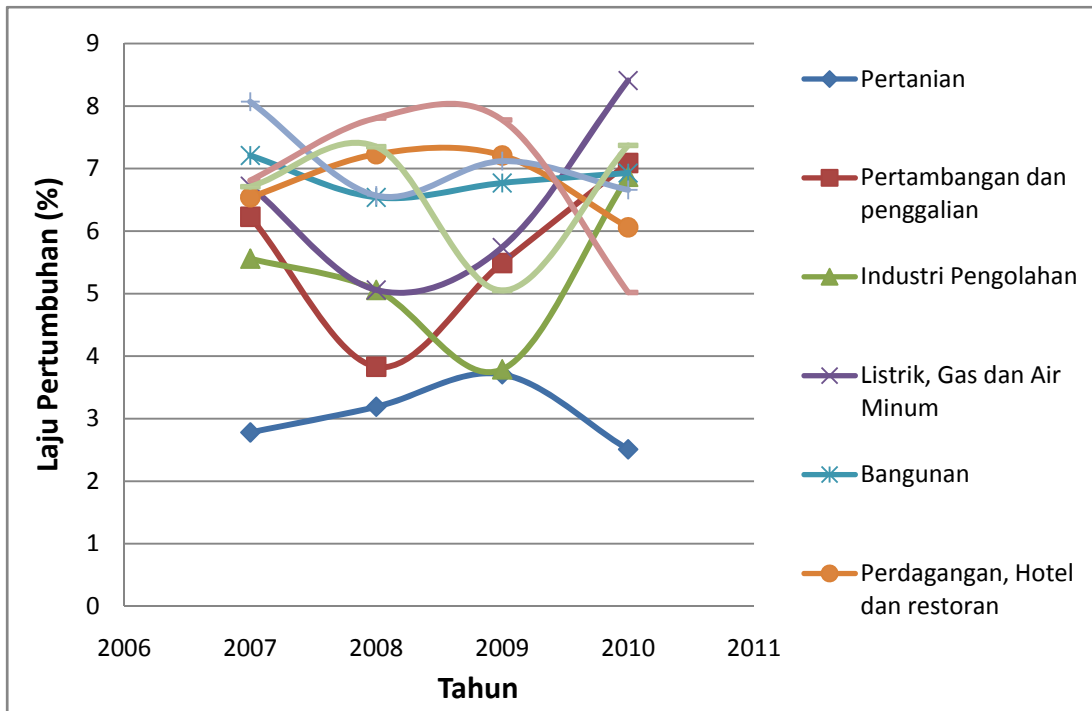
No	Provinsi	Kontribusi Sektor Pertanian (persen)
1	DKI Jakarta	0,07
2	Jawa Barat	13,1
3	Banten	7,8
4	Jawa Tengah	18,7
5	DI Yogyakarta	17,3
6	Jawa Timur	15,0
	Jumlah	100

Sumber : Statistika Indonesia, 2010

Di pulau jawa provinsi yang mempunyai kontribusi sektor pertanian paling tinggi terhadap PDRB yaitu Provinsi Jawa Tengah (18,7 %). DKI Jakarta (0,07 %), Jawa Barat (13,1 %), Banten (7,8 %), Jawa Tengah (18,7 %), DI Yogyakarta (17,3 %) dan Jawa Timur (15,0%) . Meskipun Jawa Tengah yang memiliki tingkat tertinggi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tetapi laju pertumbuhan sektor pertanian ada dalam keadaan stagnasi atau bahkan dikatakan mundur.

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa laju sektor pertanian sempat mengalami laju kenaikan dari tahun 2007 sampai 2009 kemudian terjadi penurunan di tahun 2010. Jika dibandingkan dengan sektor yang lain pertumbuhan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat. Laju pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah di pengaruhi dari bagian bagian daerah tersebut. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yaitu melalui peningkatan pengeluaran sektor pertanian.

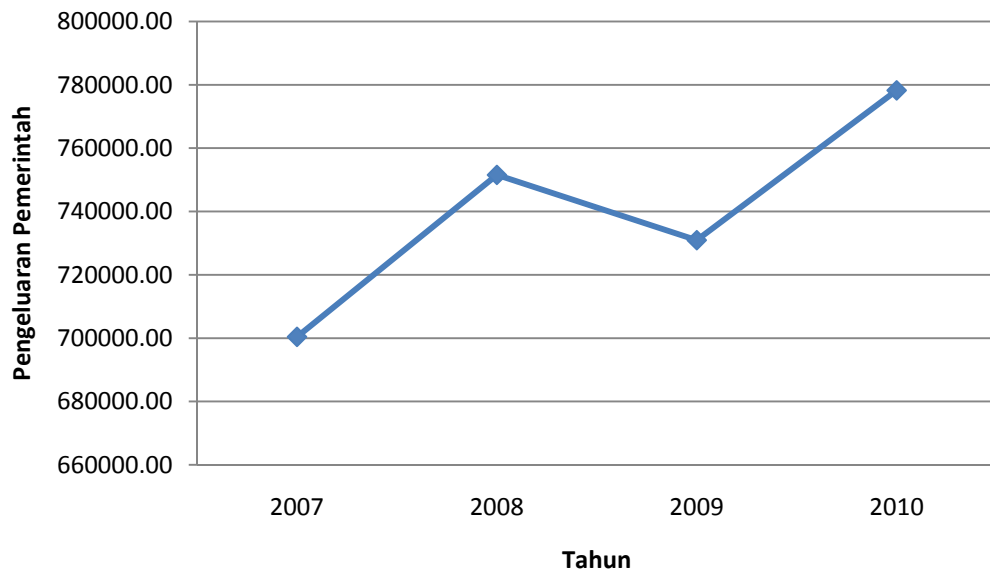
Grafik 1.1
Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektoral di Jawa Tengah
Tahun 2007-2010



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah, BPS 2011

Berdasarkan Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pertanian di Jawa Tengah mengalami peningkatan nilainya dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010, tahun 2009 mengalami penurunan, pertumbuhan pengeluaran pemerintah dari setiap tahunnya tidak terlepas dari faktor pendapatan daerah yang didapat, seperti pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Semakin tingginya pendapatan yang didapat oleh suatu daerah, maka pemerintah daerah setempat juga akan berusaha meningkatkan besaran anggaran pengeluaran pemerintah.

Grafik 1.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian di Jawa Tengah
Tahun 2007-2010



Sumber: APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Jawa Tengah, berbagai tahun

Peningkatan Pengeluaran pemerintah disektor pertanian di setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut.

Berdasarkan Tabel 1.3 pertumbuhan sektor pertanian tiap-tiap daerah berfluktuatif. Beberapa daerah ada yang memiliki pertumbuhan di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Tetapi ada juga daerah yang menunjukkan angka yang negatif Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan. Adapun daerah yang mempunyai laju pertumbuhan tertinggi yaitu Kabupaten Karanganyar, kabupaten Blora dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010 (dalam persen)

No	Kab./Kota	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata
1	Kab. Cilacap	2,91	3,66	3,85	3,98	3,60
2	Kab. Banyumas	3,14	5,15	4,89	3,71	4,22
3	Kab. Purbalingga	4,23	2,81	3,89	3,31	3,56
4	Kab. Banjarnegara	4,16	3,76	4,02	1,89	3,46
5	Kab. Kebumen	0,98	8,33	2,04	2,1	3,36
6	Kab. Purworejo	3,96	4,87	3,39	3,76	4,00
7	Kab. Wonosobo	3,31	3,48	3,85	3,96	3,65
8	Kab. Magelang	2,48	2,85	3,66	1,58	2,64
9	Kab. Boyolali	1,17	1,75	3,42	-0,1	1,56
10	Kab. Klaten	1,51	4,22	4,81	-9,15	0,35
11	Kab. Sukoharjo	5,3	4,98	4,92	4,35	4,89
12	Kab. Wonogiri	4,35	3,6	4,38	0,48	3,20
13	Kab. Karanganyar	5,57	9,08	9,08	6,31	7,51
14	Kab. Sragen	3,94	3,46	5,25	4,43	4,27
15	Kab. Grobogan	3,6	5,67	4,93	3,84	4,51
16	Kab. Blora	4,17	5,86	4,87	5,08	5,00
17	Kab. Rembang	0,64	3,07	3,09	3,3	2,53
18	Kab. Pati	4,19	4,41	3,82	3,99	4,10
19	Kab. Kudus	-1,95	3,83	10,49	4,68	4,26
20	Kab. Jepara	1,5	1,4	4,59	-3,39	1,03
21	Kab. Demak	2,76	4,16	4,2	2,74	3,47
22	Kab. Semarang	3,81	3,09	5,13	2,21	3,56
23	Kab. Temanggung	4,06	-1,07	6,14	3,66	3,20
24	Kab. Kendal	0,29	3,87	12,98	-1,09	4,01
25	Kab. Batang	4,06	4,56	2,78	2,95	3,59
26	Kab. Pekalongan	3,37	3,68	4,77	3,61	3,86
27	Kab. Pemalang	1,43	3,34	3,46	3,47	2,93
28	Kab. Tegal	-1,06	-1,06	-0,73	0,36	-0,62
29	Kab. Brebes	2,99	2,53	3,08	3,7	3,08
30	Kota Magelang	2,5	2,49	2,37	0,12	1,87
31	Kota Surakarta	1,54	-1,14	1,19	0,29	0,47
32	Kota Salatiga	7,86	6,67	0,68	1,3	4,13
33	Kota Semarang	2,58	5,68	1,25	2,78	3,07
34	Kota Pekalongan	-7,08	-6,24	-3,37	-3,07	-4,94
35	Kota Tegal	2,23	2,27	2,59	2,46	2,39
	Rata-Rata	2,59	3,40	3,99	2,10	3,02

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah, 2011

Besarnya laju pertumbuhan pertanian di tiap daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dalam daerah itu sendiri. Perbedaan kapasitas daerah mempengaruhi besaran PDRB, di mana PDRB merupakan tingkat output yang dapat mengidentifikasi pertumbuhan sektor tersebut. Pembangunan di sektor pertanian bukan suatu hal yang mudah karena terdapat kendala-kendala, yang antara lain berupa modal, kualitas tenaga kerja, teknologi dan lain-lain.

Salah satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian yaitu dengan pendanaan sektor pertanian yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang sebuah dinas untuk pembangunan sektor pertanian. Program pertanian yang dibuat diharapkan dapat membantu para petani dalam mengembangkan sektor pertanian di daerahnya. Program dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan akan suatu wilayahnya daerah perkotaan dan pedesaan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian di 35 Kaputaen/Kota di Jawa Tengah berbeda-beda tiap daerah, tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Pada Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian di masing-masing daerah memiliki trennya sendiri. Beberapa daerah menunjukkan peran pemerintah sangat tinggi dalam perekonomian yang tercermin dari tingginya pengeluarannya.

Tabel 1.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian
35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007-2010 (jutaan rupiah)

No	Kab./Kota	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Cilacap	25302,50	26722,95	31861,79	35774,17
2	Kab. Banyumas	10841,80	24239,60	25137,51	20307,13
3	Kab. Purbalingga	19766,82	22365,25	16868,60	21195,90
4	Kab. Banjarnegara	20451,14	22884,09	15725,67	16259,83
5	Kab. Kebumen	30133,21	26559,45	25862,36	22348,00
6	Kab. Purworejo	21995,35	24127,75	18133,10	17791,52
7	Kab. Wonosobo	17825,59	20370,10	14733,75	23293,25
8	Kab. Magelang	28574,74	30775,92	28052,50	32026,65
9	Kab. Boyolali	27092,41	28388,72	2056,15	28922,67
10	Kab. Klaten	20512,92	23240,72	20501,83	19506,94
11	Kab. Sukoharjo	20909,42	22386,44	17407,66	19287,47
12	Kab. Wonogiri	26528,58	26655,59	29432,83	30311,98
13	Kab. Karanganyar	21780,56	21788,32	21308,82	23100,65
14	Kab. Sragen	25695,92	27804,23	27738,53	21343,90
15	Kab. Grobogan	24126,10	24618,68	25077,02	31488,70
16	Kab. Blora	22375,81	24133,65	13582,69	25850,06
17	Kab. Rembang	27118,54	23074,58	21224,39	24594,40
18	Kab. Pati	33671,54	33875,83	28428,74	35297,71
19	Kab. Kudus	12219,91	17576,75	21008,60	19914,60
20	Kab. Jepara	21997,40	22040,93	23493,57	24620,56
21	Kab. Demak	19024,98	23179,81	17555,82	25709,45
22	Kab. Semarang	32413,39	33741,42	24475,17	29370,30
23	Kab. Temanggung	19309,22	19085,82	22163,08	25117,81
24	Kab. Kendal	22023,19	23179,81	25204,91	27797,71
25	Kab. Batang	25533,27	21334,88	24796,68	27419,93
26	Kab. Pekalongan	17190,85	22189,25	15928,26	23931,83
27	Kab. Pemasang	13152,03	15198,51	20962,12	20106,11
28	Kab. Tegal	19103,90	19629,87	22612,66	18789,78
29	Kab. Brebes	22440,14	24574,47	25936,60	35874,18
30	Kota Magelang	8889,83	6973,42	4490,43	4615,30
31	Kota Surakarta	8633,01	9121,30	60903,10	6175,04
32	Kota Salatiga	6398,24	7000,42	7740,36	7139,55
33	Kota Semarang	13155,48	15350,20	14848,03	14092,52
34	Kota Pekalongan	9269,22	10003,13	8245,20	12190,30
35	Kota Tegal	4940,54	7351,64	7429,92	6699,03

Sumber: APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan sekretariat Daerah Jawa Tengah, berbagai tahun

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah melalui instrument kebijakan dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pertanian dari tahun ke tahun bertujuan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian daerah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu perekonomian pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan tingkat PDRB. Di Provinsi Jawa Tengah pengeluaran pemerintah sektor pertanian mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi tidak diikuti peningkatan PDRB disektor tersebut. Selain pengeluaran pemerintah investasi dan Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian karena investasi merupakan modal dan petani sebagai pelaku sektor pertanian semakin tinggi modal dan produktivitas tenaga kerja di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian 35 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, terhadap PDRB sektor pertanian 35 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dua kalangan dalam masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat Umum

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan sektor pertanian di Jawa Tengah

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu panduan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pada sektor pertanian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai PDRB sektor pertanian 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan – landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu teori – teori yang relevan dan mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain teori pembangunan (teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik). Dalam bab ini juga tercantumkan penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian

dan definisi operasional. Pada studi ini digunakan dengan menggunakan data sekunder dengan jenis data adalah panel data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat pertumbuhan sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran – saran yang direkomendasikan kepada pihak – pihak tertentu atas dasar penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1.Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan turut meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Kuznet (dalam Todaro, 2004) mengemukakan enam karakteristik atau ciri dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi
3. Tingkat transformasi struktur ekonomi yang tinggi
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih pesat melalui kebijakan-kebijakan berikut:

1. Mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk

Di negara sedang berkembang, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sering dipandang sebagai masalah utama, karena itu mengurangi pertumbuhan penduduk menjadi tujuan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mengembangkan teknologi

Pertumbuhan ekonomi juga tergantung dari adanya perkembangan teknologi dan inovasi yang dilakukan. Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan produktivitas pekerja tinggi, akan tetapi hanya perkembangan teknologi yang berkelanjutan yang akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan pesat dalam perekonomian.

3. Meningkatkan tabungan

Menurut model Solow, adanya suatu tingkat tabungan yang semakin tinggi mengandung arti adanya standar hidup yang lebih tinggi pula dalam jangka panjang. Peningkatan tabungan akan menyebabkan investasi neto bertambah pada setiap tingkat stok modal per kapita. Sebagai akibatnya pertambahan stok modal modal akan semakin cepat, selanjutnya akan mempercepat kenaikan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi.

4. Meningkatkan efisiensi penanaman modal

Dalam mengembangkan stok modal dalam suatu Negara, pemerintah dan swasta memegang peranan yang berbeda. Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan investasi adalah untuk mengembangkan infrastruktur, yaitu membuat jalan jembatan, pelabuhan, lapangan terbang, sekolah dan rumah sakit. Tanggung jawab swasta adalah mendirikan perusahaan dan industry barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada waktu yang sama akan menghasilkan keuntungan kepada mereka.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Teori Adam Smith

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan laissez-faire, tetapi juga merupakan ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi.

Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis.

Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu Negara menurut Smith ada tiga yaitu:

1. Sumberdaya alam yang tersedia (atau faktor produksi)
2. Sumberdaya insani (atau jumlah penduduk)
3. Stok barang modal yang ada

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok modal, menurut Smith, merupakan unsure produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan

output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini biasa menghasilkan pertumbuhan output, menurut Smith, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan.

b. Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

2.1.2.2 Teori Harrod-Domar

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Bila diasumsikan terhadap hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal atau K , dengan GNP total atau Y , jika dibutuhkan modal sebesar US\$3 untuk menghasilkan US\$1 dari GNP maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP .

Hubungan ini dikenal sebagai rasio modal-output atau capital output ratio sebesar tiga banding satu. Semisal rasio modal-output adalah k , dan rasio tabungan nasional atau *nasional saving ratio* adalah s merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu ditabung (misal 6 persen) dan bahwa jumlah investasi baru ditentukan oleh jumlah tabungan total (S), maka dapat disusun sebuah model pertumbuhan ekonomi sederhana yakni:

- Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s , dari pendapatan nasional (Y). sehingga:

$$S=sY \dots\dots\dots(2.1)$$

- Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan dari perubahan dari stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK sehingga dapat dituliskan persamaan sederhana kedua:

$$I=\Delta K \dots\dots\dots(2.2)$$

Tetapi karena jumlah stok modal, K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output, Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-output, k , maka:

$$K/Y=k$$

Atau

$$\Delta K/\Delta Y=k \dots \dots \dots (2.3)$$

- Terakhir, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S=I \dots \dots \dots (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) di atas telah diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan (2.2) dan persamaan (2.3), kita juga telah mengetahui bahwasannya:

$$I = \Delta K = k\Delta Y$$

Dengan demikian, kita dapat menulis “identitas” tabungan sama dengan investasi dalam persamaan (2.4)

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \dots \dots \dots (2.5)$$

Atau bias diringkas menjadi

$$sY = k\Delta Y \dots \dots \dots (2.6)$$

selanjutnya apabila kedua sisi persamaan (2.6) dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dengan k , maka didapati:

$$\Delta Y/Y=s/k \dots \dots \dots (2.7)$$

(Todaro, 2004)

2.1.2.3 Teori Schumpeter

Pendapat Schumpeter, yang merupakan landasan teori pembangunannya, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam faktor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama.

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi di sini berarti perbaikan “teknologi” dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar

baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. (Lincoln Arsyad, 1997)

2.1.2.4 Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik berkembang sejak tahun 1950 an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

Menurut teori ini, rasio modal *output* (COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah *output* tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan.

Teori pertumbuhan Neo-klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas.

Fungsi Tersebut bias dituliskan dengan cara berikut:

$$Q_t = T_t^a K^t L_t^b$$

Di mana:

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga

Nilai T_t , a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa $a + b = 1$, yaitu berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing factor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan *output*. (lincoln Arsyad, 1997).

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah factor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian factor produksi dari kegiatan produksi di suatu wilayah berasal dari wilayah lain. Demikian juga sebaliknya, factor produksi yang dimiliki wilayah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Dengan kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran "Production Originate". Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu wilayah tidak

sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa gaji/upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan) yang mengalir antar wilayah (termasuk dari/ke luar negeri), maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dengan Produk Regional. Produk regional adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar wilayah dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar wilayah tersebut. Dengan kata lain, Produk Regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan tahun dasar menggunakan tahun 2000. Tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar karena dianggap representative untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tahun 2000 dianggap sebagai tahun yang relative stabil setelah krisis ekonomi 1997/1998. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92 persen dan inflasi sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi.

Angka –angka PDRB dapat dihitung dengan tiga pendapatan, yaitu:

1. Menurut pendekatan produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsector atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 kelompok lapangan usaha, yaitu:

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

2. Menurut pendekatan pendapatan

PDRB adalah merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut

sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

3. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Berdasarkan cara penyajian, menurut website BPS, produk Domestik Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk Domestik Regional atas dasar harga berlaku

Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa dalam proses produksi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan harga jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Fungsi PDRB menurut BPS(2008) adalah:

- a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu kabupaten. PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
- b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah.
- c. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- e. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menggunakan barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- f. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor ekonomi.
- g. PDRB penggunaan atas dasar konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan.
- h. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.
- i. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

Dalam konteks regional kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Menurut Sadono Sukirno (2004), kekayaan alam kan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu Negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu Negara (daerah) mempunyai kekayaan alam yang dapat dioptimalkan maka *output* dapat ditingkatkan. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari Negara (daerah) yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut.

b. Jumlah dan Kualitas Dari penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan Negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, ketrampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Menurut M. Suparmoko (2000) faktor tenaga kerja merupakan salah satu fakyor penting guna meningkatkan *output*. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, maka *output* hasil produksi juga kan mengalami peningkatan. Tetapi hal tersebut hanya berlaku sampai titik tertentu karena dibatasi oleh *The Law of Diminishing return* atau Hukum Hasil Yang Semakin Menurun

c. Kapital

Kapital ialah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah *output*. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang (Irawan dan M. Suparmoko, 1997) adapun barang-barang yang termasuk capital meliputi modal, pabrik dan alat-alat produksi, gedung dan bangunan, dan lain sebagainya.

d. Tingkat Teknologi

Teknologi merupakan cara mengolah atau menghasilkan barang dan jasa tertentu agar memiliki nilai tambah. Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi, yaitu penemuan baru yang telah diterapkan dalam proses produksi, seperti menemukan daerah pemasaran baru, menemukan komoditi baru, menemukan cara produksi baru, dan sebagainya (M. Suparmoko, 2000)

e. Sistem Sosial dan Sikap masyarakat

Dalam Sadono Sukirno (2004) disebutkan bahwa sistem social dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius dalam pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktifitas tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun tidak dapat dicapai secara maksimal.

Faktor non ekonomi adalah lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai moral dalam suatu bangsa (Jhingan, 1993).

2.1.4 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi macam kelompok peran (Dumairy, 1999) yaitu:

1. Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatan bias optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi disetiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah-wilayah Negara yang bersangkutan maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil-hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan

cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir “pihak” tertentu. Daya tawar (*bargaining position*) antara pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian direddistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara aproprri berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang

dicanangkan dan dikampanteakan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya : atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memacu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut bukan hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian (Dumairy, 1999). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah akan memberikan implikasi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Diharapkan adanya pengeluaran pemerintah menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru, adanya peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan output nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

2.1.6.1 Kebijakan Fiskal

Menurut Willam A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit.

Kebijakan fiskal otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang menurut Lipsey (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *outonomus* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut:

1. Pajak

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan disposibel yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi marginal tertentu dari pendapatan disposibel, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional.

2. Pengeluaran pemerintah

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, semakin kecil kadar ketidakstabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian.

3. Transfer pemerintah

Transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan

pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, Pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang.

Stabilitas ekonomi dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai, jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono, 1992;2)

Pengeluaran pemerintah menurut Keynes yaitu Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan sumber legitimasi kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan/penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan/menurunkan pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa

$Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam menentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).

2.1.6.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Walter Nicholson, 2001). Menurut Guritno (1997) secara mikro ekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi

2.1.6.3 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman. Menurut isi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989) adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave, menurut Wagner (Guritno M, 1997) jika pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasi sebagai berikut

$$\frac{P_k P P_1}{P P K_1} < \frac{P_k P P_2}{P P K_2} < \dots < \frac{P_k P P_n}{P P K_n}$$

Dimana:

P_kPP : Pengeluaran pemerintah perkapita

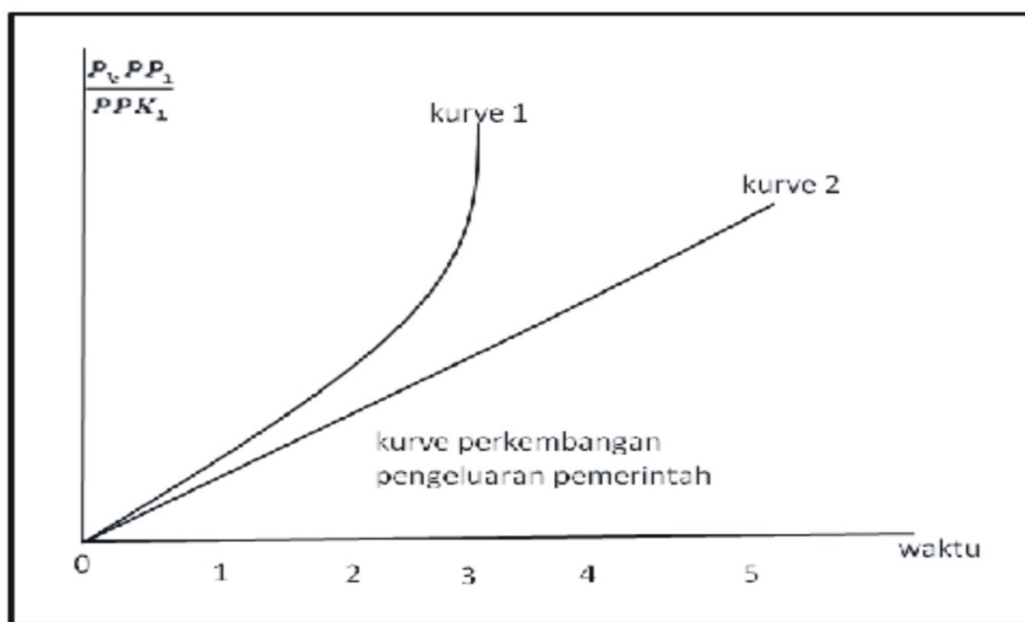
PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pendapatan

1,2 ... n Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ditunjukkan dalam gambar berikut ini, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas, sebagaimana yang ditunjukkan Kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh Kurva 2 yang memiliki bentuk linear.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner



Sumber: Guritno Mangkoesobroto, 1993

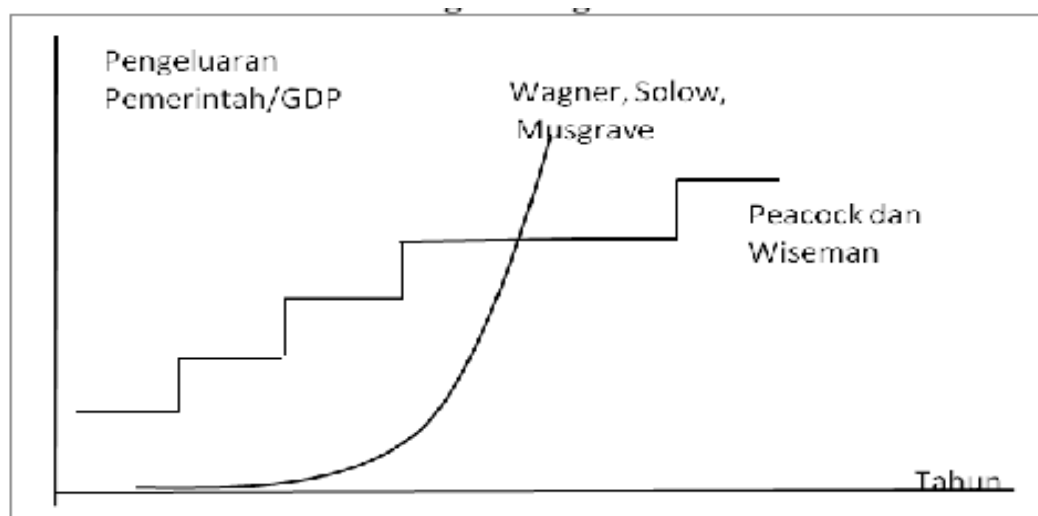
Peacock dan Wiseman (Guritno, 1993) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih

cenderung menaikkan pajak membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak harus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Gambar 2.2

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Guritno Mangkoesebroto, 1993

2.1.7 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

✓ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian terhadap PDRB sektor pertanian

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*agregat demand / AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di Negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relative terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

Sektor pertanian merupakan sektor primer yaitu dimana output dari sektor pertanian akan dijadikan input oleh sektor-sektor lain. Pertanian memiliki peranan penting dalam kontribusi PDRB sehingga keberadaan sektor pertanian perlu mendapat dukungan khusus dari setiap daerah. Untuk mendukung sektor pertanian maka diperlukan program kegiatan pertanian yang menunjang agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Dalam pelaksanaan program-program tersebut

tentunya memerlukan dana dalam pelaksanaan operasional, besaran proporsi dana yang dikeluarkan di sektor pertanian menggambarkan seberapa besar dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Anggaran pengeluaran di sektor pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani karena dapat menjadi intensif para petani agar tidak beralih ke sektor yang lainnya dan sektor pertanian masih tetap berperan penting dalam kegiatan perekonomian. (Mubyarto, 1994).

Fakta lainnya yang dikemukakan oleh Bank Dunia berdasarkan penelitiannya adalah (1) pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan pertanian (2) komposisi dari pengeluaran menentukan dampak yang diberikan, pengeluaran untuk barang-barang publik berdampak positif, sedangkan subsidi untuk input privat cenderung berdampak negatif; (3) untuk kasus Indonesia, pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan, tetapi tergantung dari komposisi pengeluarannya; (4) selama delapan tahun terakhir, pengeluaran untuk pertanian di Indonesia meningkat secara signifikan.

✓ **Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan

tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (growth) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (employment rate). Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2004) menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (kapital= K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model berikut:

$$Y = A.F(K,L)..... (2.8)$$

di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L , atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasikan dari kenaikan A . Oleh

karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi—yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$Y = (LS + RL) + (KS + RK) + A \dots\dots\dots(2.9)$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan output (Output growth)

LS = Kontribusi tenaga kerja (Labor share)

RL = Pertumbuhan tenaga kerja (Labor growth)

KS = Kontribusi modal/kapital (Capital share)

RK = Pertumbuhan modal/kapital (Capital growth)

A = Teknologi (Technological progress)

Persamaan diatas menunjukkan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input-input tertentu terhadap pertumbuhan output di masing-masing negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara atau provinsi.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku sehingga terbentuk harga agregat ekonomi menurut harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang menambah kesempatan kerja seharusnya dapat mengurangi jumlah penganggur, apabila jumlah angkatan kerjanya tetap. Namun kenyataannya tidaklah demikian; jumlah angkatan kerja terus berkembang yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, maupun mobilitas tenaga kerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian antara lain:

1. Giga Nur Pratigina (2009)

Judul: Keterkaitan Antara Alokasi Anggaran dan Kinerja Sektor Pertanian. Data yang digunakan adalah data sekunder, dalam penelitian ini diteliti pengaruh pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan terhadap produktivitas sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kuadran terkecil atau *Weight Least Square* (WLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PRD_t = \beta_0 + \beta_1 RTN_t + \beta_2 BGN_t + \epsilon_t$$

Dimana:

PRD = Produktivitas sektor pertanian

β_0 = Konstanta

β_1, \dots, β_2 = Koefisien regresi

RTN = Pengeluaran rutin untuk sektor pertanian (Rp)

BGN = Pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian (Rp)

ϵ_t = Variabel acak/kesalahan pengganggu

T = Waktu

Hasil analisis mengenai penelitian tersebut adalah variabel pengeluaran rutin (RTN) dan pengeluaran pembangunan (BGN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas sektor pertanian (PRD). Walaupun kedua jenis pengeluaran ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas pertanian, dampak yang diberikan pengeluaran pembangunan lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin.

2. Makmur dan Akhmad Yasin (2003)

Judul: Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertanian.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini diteliti bagaimana pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 D$$

Dimana:

Y = PDRB (NTB) sektor pertanian

β_0 = Intercept

β_1 = Koefisien tenaga kerja

β_2 = Koefisien investasi dalam negeri (PMDN)

- β_3 = Koefisien investasi luar negeri (PMA)
- β_4 = Koefisien dummy variabel
- X1 = Tenaga kerja
- X2 = PMDN
- X3 = PMA
- D = Dummy variabel untuk melihat pengaruh krisis terhadap PDRB sektor pertanian

Hasil analisis mengenai penelitian tersebut adalah variabel investasi dilihat dari jenis investasinya, pengaruh PMDN signifikan, sedangkan untuk PMA tidak signifikan. Variabel tenaga kerja tidak signifikan. Tidak signifikannya tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi.

3. Lukman Adam (2011)

Judul: Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap PDB Sektor Pertanian.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini diteliti pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, jumlah uang beredar, subsidi, pajak, suku bunga terhadap PDB sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan metode *OLS (ordinary Least Square)*. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Log PDB} = \alpha_0 + \alpha_1 \log \text{GA} + \alpha_2 \log \text{Ms} + \alpha_3 \log \text{Te} + \alpha_4 \log \text{Er} + \alpha_5 \log \text{S} + \alpha_6 \text{Dm} + \mu$$

Dimana:

PDB = Produk Domestik Bruto Indonesia di sektor pertanian (Rp)

GA = Pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian (Rp)

M_s = Jumlah uang beredar (Rp)

T_e = Pajak (Rp)

E_r = Tingkat suku bunga (%)

S = Subsidi (Rp)

D_m = *Dummy* variabel

$\alpha_0.. \alpha_6$ = *Intercept* (konstanta)

μ = Galat *error*

Hasil analisis mengenai penelitian tersebut adalah variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif, hal ini berarti bahwa semakin meningkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian tidak signifikan terhadap PDB sektor pertanian berarti tidak memberikan dampak secara langsung terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian.

- Variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian, hal ini berarti bahwa semakin meningkat jumlah uang beredar, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Variabel jumlah uang beredar tidak signifikan terhadap PDB sektor pertanian hal ini sesuai dengan hipotesis Keynes, bahwa penawaran uang berpengaruh positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi, apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga.
- Variabel pajak berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian, hal ini berarti bahwa semakin meningkat pajak, maka PDB sektor pertanian akan

semakin menurun. Variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

- variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian, hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya tingkat suku bunga, maka PDB sektor pertanian akan semakin menurun. Variabel tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.
- Variabel subsidi berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian, hal ini berarti semakin meningkat subsidi, maka PDB sektor pertanian akan semakin meningkat. Variabel subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

4. Darsono (2008)

Judul: Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan pada Agroindustri di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini diteliti, kinerja sektor pertanian dan agroindustri dalam agregat di Indonesia, hubungan antara kebijakan fiskal dengan kinerja sektor pertanian dan kinerja agroindustri, instrument kebijakan fiskal apa yang efektif mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan kinerja agroindustri di Indonesia, keterkaitan antara sektor pertanian dengan agroindustri pada situasi kebijakan fiskal di Indonesia. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\Delta \square = \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta x_{t-i} + \mu_0 + \mu_1 t + \alpha \beta' x_{t-1} + e_t$$

Dimana:

$\Delta \square$ = vector time series

- $k-1$ = Ordo VECM dari VAR
 Γ_i = matrik koefisien regresi
 μ_0 = vektor intersep
 μ_1 = vektor koefisien regresi
 α = matrik loading
 β' = vektor kointegrasi
 x_t = PPh, PPn, DEF, U, EA, SP, RDA, IA, DF, I, KONS, GDPA, TKA
 XA, MA, WP, NTI, NTO, DSA
 e_t = error term,
 t = waktu

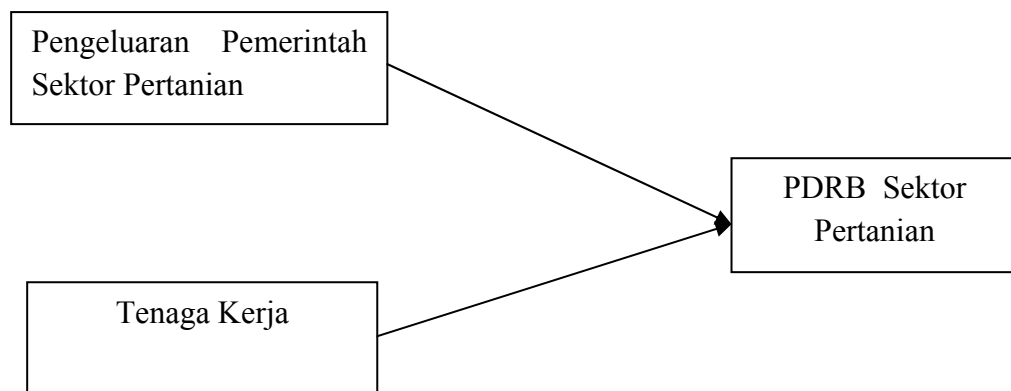
Hasil analisis mengenai penelitian tersebut adalah : secara umum kebijakan fiskal tidak efektif memperbaiki kinerja sektor pertanian dan agroindustri. Secara khusus: *pertama*, (a) dorongan fiskal belum optimal dan bertendensi menurun (*undervalue*) untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan agroindustri, (b) terjadi gejala kurang tepat sasaran (*missallocation*) dan kurang fokus pada fasilitas publik pertanian (seperti infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian), (c) penurunan kinerja sektor pertanian terjadi pada semua aspek dalam perekonomian, (d) nilai tambah input dan output serta daya saing agroindustri secara absolut meningkat namun pertumbuhannya menurun konsisten. *Kedua*, instrument kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang paling kuat mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan agroindustri adalah: pajak penghasilan, anggaran sektor pertanian, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, anggaran infrastruktur

pertanian, dan desentralisasi fiskal, disamping itu investasi. *Ketiga*, (a) guncangan instrument kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang direspon dengan peningkatan kinerja sektor pertanian adalah: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, anggaran sektor pertanian, anggaran infrastruktur pertanian, disamping itu juga investasi dan konsumsi, (b) respon mencapai keseimbangan selama 8 tahun, (c) guncangan instrument kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang direspon dengan peningkatan kinerja agroindustri adalah: pajak pertambahan nilai, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, dan anggaran infrastruktur pertanian, (d) respon mencapai keseimbangan selama 7 tahun, (e) instrument kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang efektif memperbaiki kinerja sektor pertanian adalah: pajak pertambahan nilai, subsidi pertanian, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, anggaran infrastruktur pertanian, dan desentralisasi fiskal, (f) instrumen kebijakan fiskal dalam jangka panjang yang efektif memperbaiki kinerja agroindustri adalah: pajak pertambahan nilai, anggaran infrastruktur pertanian, dan desentralisasi fiskal, (g) secara keseluruhan, instrumen kebijakan fiskal yang berpengaruh kuat, direspon positif, dan efektif dalam mempengaruhi variabilitas dan peningkatan kinerja sektor pertanian dan agroindustri adalah: penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai, anggaran penelitian dan pengembangan pertanian, anggaran infrastruktur pertanian, dan desentralisasi fiskal. *Keempat*, (a) guncangan kinerja sektor pertanian dalam jangka panjang yang direspon dengan peningkatan kinerja agroindustri adalah: ekspor produk pertanian dan kesejahteraan petani, (b) respon mencapai keseimbangan selama 7 tahun, (c)

kinerja sektor pertanian yang berperan efektif /terkait mendorong kinerja agroindustri adalah: PDB pertanian, ekspor, dan impor produk pertanian.

2.3 Kerangka pemikiran

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan sektoral. Sektor yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah sektor pertanian.



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka (yaitu landasan teori dan pemikiran terdahulu), tujuan penelitian serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- ✓ Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Tengah periode 2007-2010.
- Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Tengah periode 2007-2010.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB sektor pertanian di Kabupaten/Kota di Jawa tengah tahun 2007-2010
2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB sektor pertanian

PDRB sektor pertanian merupakan variabel yang di gambarkan dengan nilai konstan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian dengan tahun dasar 2000. Variabel ini menggunakan satuan jutaan rupiah.

2. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian (GOV), merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, variabel ini menggunakan satuan jutaan rupiah.
3. Tenaga kerja (TK)
Data tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, variabel ini menggunakan satuan rupiah.
4. Dummy wilayah
Dalam regresi, variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independennya saja (dalam hal ini pengeluaran pemerintah, tenaga kerja), tetapi juga oleh variabel tambahan yang tidak berubah seiring waktu atau variabel yang menunjukkan keunikan atau heterogenitas setiap daerah. Variabel ini disebut *dummy*. Tujuan dari pemberian heterogenitas atau variabel *dummy* dalam penelitian ini, untuk menandakan seberapa besar perbedaan antara satu daerah dengan *benchmark* yang dipilih. Variabel *dummy* ditunjukkan dengan angka 0 dan 1. Dimana DUM1 = 1 untuk daerah tersebut (contoh: Cilacap), dan untuk angka 0 bukan daerah tersebut (contoh: bukan Kabupaten Cilacap) (Gujarati,2012).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber

lain dan diperoleh dari pihak lain, seperti: buku-buku, literature, catatan-catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, tidak meneliti obyek secara langsung untuk memperoleh data, melainkan mempergunakan data yang telah tersedia.

Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Keuangan Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik, maupun instansi-instansi terkait lainnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor pertanian atas dasar harga konstan 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2010
- b. Data Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) pengeluaran pemerintah sektor pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2010
- c. Data Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa tengah tahun 2007-2010

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data tersebut diatas diperoleh dari:

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Jawa Tengah dalam angka
2. Data APBD diperoleh Biro keuangan Jawa Tengah
3. Data jumlah tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan "Jawa Tengah dalam Angka".

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang berkaitan dengan objek studi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/ kantor/ instansi atau lembaga terkait. Data yang akan dikumpulkan diperoleh dari dinas/ lembaga/ kantor seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

3.4. Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *evIEWS 6*. Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variable atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Adapun keuntungan dari perhitungan menggunakan regresi data panel disbanding dengan pendekatan *cross section* maupun *time series*, diantaranya:

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variable

penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.

2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Di samping berbagai keunggulan dimiliki model data panel tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel yaitu permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (*cross-correlation*) antar unit individu pada periode yang sama (Hasiao, dalam Gujarati, 2003).

3.4.1 Spesifikasi Model

Untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah (GOV), dan tenaga kerja (TK) terhadap PDRB, adapun persamaan yang digunakan dibentuk berdasarkan teori Solow tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (kapital= K) kapital dalam variabel ini menggunakan data pengeluaran pemerintah di sektor pertanian. tenaga kerja (L). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{PDRBit} = \beta_0 + \beta_1 \text{GOV}_{it} + \beta_2 \text{TK}_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots \quad (3.1)$$

Dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

GOV = Pengeluaran pemerintah

TK = Tenaga kerja

β_0 = intersep

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi

μ_{it} = komponen error di waktu t untuk unit *cross-section* i

i = 1, 2, 3 ..., 35

t = 2007, 2008, 2009, 2010

Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka setidaknya ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu Gujarati (2003):

1. Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode *common effect* atau koefisien tetap antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Ini adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel.
2. Metode fixed effect atau slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa μ_{it} merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam *constan term* pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun intersepnya sama antar waktu (*time*

invariant). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.

3. Metode *random effect* menetapkan μ it sebagai pengganggu spesifik kelompok identik dengan μ it, kecuali terhadap masing-masing kelompok. Namun gambaran tunggal yang memasukkan regresi identik untuk setiap periode. Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS).

3.4.2 Pengujian Model

Untuk memilih model yang tepat, dapat dilakukan beberapa pengujian model (Gujarati, 2003), yaitu *pertama* menggunakan Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji F), yaitu untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau model *common effect*. Adapun uji F statistiknya, sebagai berikut;

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/(m)}{(1 - RRSS)/(nt - n - k)} \quad (3.2)$$

Dimana:

RRSS ; *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode OLS/*common effect*).

URSS ; *Unrestricted residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

Jika hasil *Restricted F Test* menunjukkan hasil yang lebih besar dari pada F tabel berarti menggunakan model *fixed effect* lebih baik dari pada menggunakan model *common effect*, begitu juga sebaliknya. Jika hasil menunjukkan model yang lebih baik digunakan adalah model *fixed effect*, maka pengujian selanjutnya yang

perlu dilakukan adalah uji hausman, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih baik untuk digunakan. Uji Hausman dilakukan dengan melihat signifikansi dari probabilitas dari uji hausman itu sendiri. Jika uji hausman menunjukkan probabilitas yang signifikan maka menggunakan model *fixed effect* lebih baik daripada menggunakan model *random effect*, begitu juga dengan sebaliknya. Namun jika hasil dari *Restricted F Test* menunjukkan bahwa model yang lebih baik digunakan adalah model *common effect* maka pengujian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji lagrange multiplier (LM), yang digunakan untuk mengetahui apakah menggunakan model *common effect* lebih baik dari model *random effect*. Jika hasil dari uji LM menunjukkan H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima maka model yang lebih baik digunakan adalah model *random effect*, begitu juga dengan sebaliknya.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Deteksi Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa nilai residual (*disturbance term*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastisitas, atau dengan kata lain varians dari residual adalah sama. Jika varians dari residual tidak sama, maka akan muncul permasalahan yang disebut dengan heteroskedastisitas. Permasalahan heteroskedastisitas tidak menyebabkan model menjadi bias, namun menyebabkan model tidak lagi mempunyai varians yang efisien atau yang minimum. Hal ini menyebabkan asumsi best dalam BLUE tidak dapat tercapai.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam sebuah model, dapat dilakukan dengan menggunakan Uji White. Uji ini secara manual dapat dilakukan dengan melakukan regresi dengan menempatkan residual kuadran sebagai variabel dependen terhadap variabel bebas kuadran dan perkalian variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2004).

Pengujiannya adalah jika X^2 hitung $<$ X^2 tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3.5.2 Deteksi Autokorelasi

Menurut Ghazali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Dari hasil uji LM apabila nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$ lebih besar dari nilai X^2 tabel dengan *Probability* $X^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$ lebih kecil dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

3.5.3 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.

Menurut Gujarati (1995) untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dapat dideteksi melalui:

- a) Nilai R^2 tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan
- b) Dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari R^2 model utama maka terjadi multikolinieritas.

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R regresi auxiliary maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

3.5.4 Deteksi Normalitas

Salah satu asumsi dalam penerapan untuk OLS dalam regresi linier klasik adalah distribusi probabilitas dari residual U_1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varian yang konstan. Permasalahan normalitas pada regresi panel data tidak bisa diuji dengan menggunakan uji-uji

normalitas yang ada karena data yang sangat bervariasi, untuk itu dapat dilihat menggunakan sebaran dari nilai residual. Jika sebaran residual menyebar disekitar garis regresi garis pagu maka dikatakan dapat memenuhi uji normalitas. Hanya saja untuk mengukur normalitas pada regresi panel data dibutuhkan uji lebih lanjut.

3.6 Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

3.6.1 Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness of fit*)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
- Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus (Gujarati, 2010):

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)} \quad (3.3)$$

Dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen

N : jumlah sampel

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)} \quad (3.4)$$

$$H_1 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)} \quad (3.5)$$

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan

F tabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

- H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.6.3 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis mengenai setiap koefisien regresi parsial *individual* atau untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai t dapat diperoleh dari formula berikut ini:

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{se(\hat{\beta}_2)} \dots \dots \dots (3.6)$$

Untuk hipotesis dari uji t disajikan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_2 = 0$: Suatu variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Suatu variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis nol, dapat menggunakan uji t dengan membandingkan $t_{statistic}$ dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan, dalam penelitian ini telah ditentukan tingkat signifikan 5%. Jika nilai $t_{statistic}$ melebihi t_{tabel} pada tingkat signifikansi yang dipilih, maka hipotesis nol dapat ditolak, jika yang terjadi sebaliknya, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak (Gujarati 2012).